BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal Indonesia merupakan salah satu wadah berinvestasi yang baru berkembang di Indonesia. Menurut Robert Ang (2003), pasar modal adalah suatu situasi dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas, dan komoditas yang dipertukarkan disini adalah modal, dimana modal adalah sesuatu yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan perusahaan.

Untuk masuk dan berinvestasi di pasar modal, investor membutuhkan suatu informasi yang menjelaskan kinerja perusahaan saat ini dan di masa lalu. Informasi ini diungkapkan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Namun, informasi ini tidak selamanya akurat. Manajer selaku pengelola perusahaan terkadang melakukan intervensi di dalam pelaporan tersebut atas insentif tertentu. Manajer melakukan penyesuaian pada laporan keuangan agar laporan tampak lebih baik sehingga muncul persepsi publik yang positif tentang kinerja perusahaan yang mana akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Tindakan intervensi inilah yang dinamakan aktivitas manajemen laba (*earning management*). (Lilis Setiawati, 2002).

Laporan keuangan diharapkan mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang riil. Tetapi, keinginan perusahaan untuk mendapatkan nilai positif dari pasar, yang selanjutnya menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh, dapat mendorong manajer untuk menyusun laporan keuangan yang menarik. Aharoney

et.al, Friedlan, Teoh et.al, (dalam Lilis Setiawati, 2002) membuktikan bahwa keputusan untuk mempengaruhi keputusan pasar dalam mengalokasikan dana dapat memicu perusahaan untuk menaikkan laba pada saat penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba dapat didefinisi sebagai "intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi" (Schipper, 1989, dalam Wild, et al., 2008). Scott dalam Rahmawati (2008) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*Oportunistic Earning Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earning Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sarana komunikasi antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan (Rahmawati, 2008). Tindakan manajemen laba ini telah memunculkan beberapa kasus dalam pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain seperti PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Bank Lippo Tbk. Pada PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut, Kimia Farma menyebutkan berhasil memperoleh laba sebesar Rp

132 miliar. Namun, laba yang dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 99 miliar. (Robinson Simbolon, 2002) Sama halnya dengan kasus pada PT. Lippo Tbk pada tahun 2002, berawal dari diketahuinya manipulasi pada pelaporan keuangan yang telah dinyatakan "Wajar Tanpa Syarat". Pada saat itu, laporan keuangan per 30 September 2002 Bank Lippo kepada publik bertanggal 28 November menyebutkan, total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Namun dalam laporannya ke BEJ (sekarang BEI) bertanggal 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan mengalami rugi bersih sebesar Rp 1,3 triliun. Padahal, dalam kedua laporan keuangan itu diakui telah diaudit.

Manajemen beralasan, perbedaan laba bersih dalam dua laporan keuangan yang sama-sama dinyatakan diaudit itu terjadi karena adanya penurunan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun di laporan ke BEJ. Hal ini mengakibatkan, dalam keseluruhan neraca terjadi penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen (Erry Firmansyah;2003).

Tabel 1.1
Leverage, Pajak Tangguhan dan Total Accrual
Perusahaan Food and Beverages

Emiten	Tahun	Leverage	Pajak Tangguhan	Total Accrual
Indofood	2007	63.25%	1.1244%	(1,521,644,000,000)
	2008	66.76% ↑	1.2861%	(2,581,367,100,000)
Mayora	2007	41.47%	-0.2292%	(37,110,213,676)
	2008	56.32% ↑	-0.2081% ↓	57,777,062,540
Siantar Top	2007	30.69%	-0.0803%	10,319,160,307
	2008	42.01% ↑	0.4472%	14,596,011,703

Fastfood	2007	40.05%	1.0914%	(131,279,795,000)
	2008	38.51%	0.4579% ↓	(130,314,856,000)
Siered	2007	22.30%	-23.013%	91,202,085,829
	2008	25.38% ↑	-12.980%	78,218,120,807
Ultrajaya	2007	38.93%	-0.6973%	93,860,400,905
	2008	34.70%	43.215%	172,872,440,105
Davomas	2007	69.38%	-33395%	(143,847,641,290)
	2008	81.39% ↑	-12003% ↓	(775,800,538,735)

Sumber : BEI (Data diolah)

Dilihat dari tabel diatas terlihat adanya fenomena *leverage* yang tinggi yang ada pada PT.Davomas. *Leverage* sebagai salah satu usaha dalam peningkatan laba perusahaan, dapat menjadi tolok ukur dalam melihat perilaku manajer dalam aktivitas manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* finansial tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya (J.C. Shanti dan C. Bintang Hari Yudhanti, 2007). Terjadinya *default* ini dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pihak principal terhadap manajemen sehingga manajemen dapat mengambil keputusan sepihak dan dapat mengambil strategi yang kurang tepat sehingga gagal bayar dapat terjadi. Hal yang menjadi kemungkinan untuk dilakukan manajer saat terancam default adalah dengan melakukan manajemen laba, sehingga kinerja perusahaan akan tampak baik di mata pemegang saham (principal) dan publik walaupun dalam keadaan perusahaan terancam *default*.

Pajak Tangguhan dilihat dari tabel diatas bernilai negatif artinya hampir setiap tahun perusahaan mengalami kerugian. penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan bagi perusahaan. Besarnya pajak yang

dikenakan dalam suatu periode akan tergantung dua faktor yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak penghasilan yang disajikan dan di laporkan dalam laporan keuangan bisnis, jelas tidak ada korelasi langsung dengan laba akuntansi. Untuk dapat menghubungkan korelasi antara pajak penghasilan dengan laba akuntansi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pajak penghasilan antar periode.

Selisih antara beban PPh menurut laba akuntansi dengan utang pajak yang dihitung menurut laba fiskal sebagai akibat adanya perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban, ditampung dalam akun " PPh ditangguhkan" dan dilaporkan dalam neraca untuk dialokasikan pada beban PPh tahun-tahun mendatang. Metode akuntansi pajak penghasilan semacam ini disebut dengan metode alokasi pajak antar periode.

Metode akuntansi PPh tanpa alokasi pajak antar periode merupakan metode akuntansi yang mengakibatkan laba bersih tidak dapat merefleksikan laba yang sebenarnya, karena beban PPh yang dilaporkan tidak terkorelasi langsung (tidak *match*) dengan laba sebelum pajak. Aktiva dan kewajiban dalam neraca juga dinyatakan terlalu rendah (*understate*) sebagai akibat tidak dilaporkannya konsekuensi pajak di masa mendatang atas perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban. (Harnanto, 2003).

Mengingat realisasi aktiva pajak tangguhan atau penyelesaian kewajiban pajak tangguhan akan terjadi di periode mendatang, maka apabila aktiva pajak tangguhan diperkirakan tidak akan dapat direalisasikan sepenuhnya maka harus diturunkan nilainya (*write down*) dengan membentuk penyisihan (*allowance*)

yang dibebankan pada periode berjalan. (Akhmad Riduan, 2004). Karena tingkat penyisihan yang tepat dari penyisihan tergantung pada ekspektasi manajer atas realisasi aktiva pajak tangguhan di masa depan, stetement ini mensyaratkan para manajer menguji jumlah pertimbangan (*judgement*) yang digunakan. Penyesuaian terhadap cadangan penilaian dilakukan secara langsung terhadap operasi yang berkelanjutan pada suatu dasar setelah pajak melalui penyisihan untuk pajak tangguhan (beban pajak), sehingga mempengaruhi laba bersih. Realisasi aktiva pajak tangguhan pada prinsipnya tergantung pada eksistensi jumlah penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang cukup dan memiliki karakter yang tepat menurut PSAK No. 46. (Akhmad Riduan, 2004)

Adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan mengharuskan manajer untuk membuat dua jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersil disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan aturan perpajakan. Penghasilan kena pajak yang merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan merupakan output dari rekonsiliasi fiskal antara laporan laba rugi komersil dengan ketentuan pembukuan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Hal ini menimbulkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (menurut perhitungan laba rugi berdasarkan standar akuntansi) dan penghasilan kena pajak (menurut perhitungan laba rugi fiskal).

Perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak disebabkan oleh adanya perbedaan konsep antara akuntansi dengan pajak dalam

pengakuan penghasilan dan biaya. Dalam konteks akuntansi PPh, perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis beda, yaitu beda waktu (*temporary/ timing differences*) dan beda tetap (*permanent differences*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan maupun *Statement of Financial Accounting Standards (SFAS)* No. 109 mengenai *Accounting for Income Taxes* bertujuan untuk mengakomodir perbedaan waktu pengakuan dalam pengungkapan laporan keuangan komersil dengan pendekatan aktiva kewajiban (Kiswara, 2009). Pendekatan aktiva kewajiban bertujuan untuk mengakui jumlah kewajiban pajak yang harus dilunasi atau jumlah pajak yang dapat diminta kembali selama tahun berjalan. Tujuan yang lain adalah untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak dimasa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau Surat Pemberitahuan pajak (Kieso, et al., 2002).

Melalui penerapan pendekatan aktiva kewajiban, PSAK No. 46 mengakhiri praktik akuntansi dan pelaporan keuangan sebelumnya mengenai beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan pengakuan kosekuensinya dalam neraca yang tidak seimbang (Harnanto, 2003).

Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi saldo rugi fiskal yang boleh dikompensasi (PSAK No. 46,

par. 27). PSAK No. 46 juga mensyaratkan agar pada tanggal neraca perusahaan harus meninjau kembali nilai tercatat aktiva pajak tangguhan. Jika laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan, maka perusahaan harus menurunkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan tersebut. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali jika besar kemungkinan laba fiskal memadai. Oleh karena itu, setiap tahun manajer harus membuat sebuah penilaian untuk menentukan apakah akan mencatat atau akan menyesuaikan aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan (Chao, et al., 2004). Penyesuaian besarnya akun penyisihan akan berdampak langsung pada laba operasi berjalan, yaitu pada penetapan pajak tangguhan yang kemudian akan mempengaruhi laba bersih periode berjalan (Miller & Skinner, 2003).

Oleh karena tidak adanya panduan ataupun rumus pasti untuk menentukan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan, maka manajer memiliki kebebasan dalam penentuan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa manajer dapat mempengaruhi besarnya laba operasi periode berjalan dengan bebas pula. Penilaian manajer untuk menentukan besarnya aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan juga bersifat subyektif, sehingga manajer harus menguji pertimbangan pokok yang digunakannya dalam menilai kemungkinan pendapatan masa lalu dan pendapatan masa depan yang akan ditampilkan (Chao, et al., 2004). Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 maka manajer memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pertimbangan

penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini memperkuat adanya indikasi terjadinya manajemen laba melalui penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Penulisan ini melihat sejauh mana *leverage* dan pajak tangguhan bila dihubungkan antara peraturan yang ada dengan kajian akademik dan bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen laba.

Maka dari itu penulis menggunakan judul : *Leverage* Dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Survey Pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis utarakan maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya tingkat *leverage* yang tinggi pada beberapa perusahaan yang dapat diindikasikan sebagai manajemen laba.
2. Pajak tangguhan pada beberapa perusahaan berada dalam keadaan negatif secara berturut-turut yang berarti perusahaan berada dalam keadaan rugi dan diindikasikan sebagai manajemen laba.
3. Total accrual yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa perusahaan merugi terus-menerus.
4. Menurunnya laba perusahaan yang disebabkan adanya hutang jangka panjang, tingginya beban keuangan dan beban bunga utang yang tinggi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Aktivitas manajemen laba merupakan kegiatan menyesuaikan laba perusahaan pada laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh pihak manajer yang bertindak selaku pengelola perusahaan. Salah satu mekanisme yang dianggap berpengaruh dalam mendeteksi aktivitas manajemen laba yaitu dengan leverage serta pajak tangguhan. Permasalahannya adalah :

1. Bagaimana tingkat *leverage* pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
2. Bagaimana tingkat pajak tangguhan pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
3. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian : Mengumpulkan data dan berbagai informasi terkait dengan *leverage* dan pajak tangguhan dan pengaruhnya terhadap manajemen laba.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui tingkat *leverage* pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
2. Untuk mengetahui tingkat pajak tangguhan pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
3. Untuk mengetahui adanya pelaksanaan Manajemen Laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi terhadap perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia mengenai bagaimana *leverage* dan pajak tangguhan terhadap Manajemen Laba.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Diharapakan dapat menambah wawasan penulis terutama tentang *leverage*, pajak tangguhan dan manajemen laba.

2. Bagi ilmu akuntansi

   Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai keterkaitan *leverage*, pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memiliki rencana untuk melakukan penelitian pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia. pada bulan Mei 2012 yang penulis rangkum pada tabel penelitian sebagai berikut :

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan *food* and *beverages* yang terdaftar di bursa efek indonesia. Data diperoleh melalui data yang diperoleh dari Pojok Bursa yang beralamat di Jl.Veteran Bandung

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai bulan Juli 2012.

Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2012				April 2012				Mei 2012				Juni 2012				Juli 2012				Agustus 2012			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul	■	■																						
	b. Persiapan teori	■	■																						
	c. Pengajuan Judul	■	■	■																					
	d. Mencari Perusahaan		■	■																					
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP				■	■	■	■	■	■	■														
	b. Bimbingan UP				■	■	■	■	■	■	■														
	c. Seminar UP											■	■												
	d. Revisi UP											■	■												
3	Pengumpulan Data													■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Pengolahan Data													■	■	■	■	■	■	■	■				
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Menulis Draft													■	■	■	■	■	■	■	■				
	b. Sidang Skripsi																						■	■	■
	c. Revisi Skripsi																						■	■	■
	d. Pengumpulan draf skripsi																						■	■	■